

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Munculnya gerakan zionisme yang dipelopori oleh Theodore Herzl menjadi awal malapetakan penjajahan yang berlangsung di Palestina pasca Perang Dunia ke-2. Pada tahun 1896 melalui bukunya *Der Judenstaat*, ia menyampaikan idenya tentang "*Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage*" "Proposal untuk sebuah solusi modern mengenai masalah Yahudi". Dalam bukunya tersebut Herzl memiliki visi mendirikan negara Yahudi dalam abad ke-20. Ia menyatakan bahwa cara terbaik untuk menghindari anti-Semitisme di Eropa yaitu dengan mendirikan sebuah negara Yahudi yang merdeka. Herzl mempopulerkan istilah "Zionisme" yang kemudian menjadi gerakan yang membidani berdirinya negara Israel pada tahun 1948.¹

Ide dan konsep Herzl tersebut kemudian ditujukan kepada seorang bankir di Inggris yang merupakan presiden dewan deputi Yahudi Inggris bernama Lionel Walter Rothschild. Rothschild sangat berperan dalam merealisasikan berdirinya negara Israel di Palestina. Salah satu hasil kerja Rothschild yaitu adanya pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1917 yang dikenal dengan "Deklarasi Balfour". Isi dari teks deklarasi tersebut mengumumkan dukungan pemerintah Inggris terhadap upaya dalam mendirikan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Deklarasi tersebut dimuat dalam sebuah surat tertanggal 2 November 1917 yang disampaikan menteri luar negeri Inggris bernama James Arthur Balfour kepada Lionel Walter Rothschild seorang pemimpin komunitas Yahudi Inggris, kemudian surat tersebut dipublikasikan di media masa pada tanggal 9 November 1917.²

Palestina pada tahun 1923-1948 dibawah mandat Inggris yang sebelumnya Palestina merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Turki Usmani. Inggris telah menjalankan undang-undang mandat di Palestina untuk memerintah

¹Thariq As-Suwaitan, *Ensiklopedia Palestina Bergambar* (Solo: Zamzam, 2017), 288.

²As-suwaitan, *Ibid.*, 308. Lihat juga Fawzy Al-Ghadiry, *Sejarah Palestina. Asal-Muasal Konflik Palestina-Israel* (Yogyakarta: Indoliterasi, 2024), 64.

di negara tersebut berdasarkan Perjanjian Liga Bangsa-bangsa. Pada tahun 1924, Komisioner Tinggi Herbert Samuel membuat garis besar proyek moneter orang Palestina yang baru dan pada Februari 1927 sebuah undang-undang mengenai mata uang Palestina diterbitkan. Berdasarkan atas peraturan tersebut orang Yahudi yang tinggal di Palestina mendapatkan *previlage* nasionalitas Palestina.³

Al Ghadiry mengungkapkan,⁴ bahwa sejak Inggris menjalankan mandatnya selama sepuluh tahun awal tercatat ada sekitar 76.400 imigran Yahudi yang memasuki wilayah Palestina yang sebagian besarnya berasal dari Eropa bagian timur. Eksodus besar-besaran orang Yahudi dari berbagai negara khususnya di Eropa menuju Palestina memicu perlawanan dari bangsa Arab. Pada tahun 1928 terjadi eskalasi perlawanan dari bangsa Palestina setelah orang-orang Yahudi berusaha untuk menguasai dinding timur Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci milik Musli. Aksi tersebut meningkatkan dukungan bangsa Arab terhadap isu Palestina. Arab melakukan penyerangan ke wilayah yang dikuasai Yahudi di Al-Khalil (Hebron), Nablus, Bysan dan Safad). Namun demikian penyerangan bangsa Arab tersebut mendapatkan perlawanan dari tentara Inggris untuk melindungi orang-orang Yahudi dengan menggunakan pasukan angkatan udara, infantri dan kapal perang bersenjata sehingga dapat dipastikan bangsa Arab mengalami kekalahan. Pada tahun 1930 jumlah imigran Yahudi mencapai 104.750 orang, kemudian enam tahun berikutnya mencapai 248.648 orang, terjadi peningkatan sekitar 164%, meski jumlah tersebut tidak termasuk orang Yahudi yang menempati wilayah Palestina dengan cara yang legal.

Pada tanggal 7 Juni 1937, komite kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Lord Bill yang menerbitkan rekomendasi proyek pembagian Palestina yang isinya sebagai berikut:

1. Pembangunan sebuah negara Yahudi yang memisahkan bagian utara dan selatan Palestina. Pendirian negara Yahudi tersebut membentang dari pesisir batas Libanon hingga selatan Jaffa yang meliputi Acre, Haifa, Safad, Typerias,

³Fawzy Al-Ghadiry, *Sejarah Palestina: Asal-Muasal Konflik Palestina-Israel* (Yogyakarta: Indoliterasi, 2024), 65-66.

⁴Fawzy Al-Ghadiry, *ibid.*, 66-67.

Nazaret, dan Tel Aviv. Pendirian negara Yahudi ini akan dihubungkan dengan Inggris melalui perjanjian dan aliansi persahabatan.

2. Tempat-tempat suci akan berada di bawah Mandat Inggris yaitu meliputi Yerusalem dan Bethlehem. Keduanya akan dihubungkan dengan Jaffa melalui jalan lintas meliputi Ullud, Al-Ramla, dan Nazaret. Mandat Inggris akan bertanggung jawab untuk melindungi tempat-tempat tersebut.
3. Tanah-tanah Palestina akan meliputi bagian selatan dan timur Palestina yaitu Kota Jaffa hingga timur Yordania. Wilayah ini akan dihubungkan dengan Inggris melalui perjanjian dan aliansi persahabatan.
4. Orang Yahudi harus membayar bantuan finansial kepada bangsa Palestina dan Inggris mendonasikan satu juta dollar kepada bangsa Palestina.
5. Eksodus orang-orang Yahudi sebanyak 325 imigran ke wilayah Palestina dilakukan secara bertahap dan menyiapkan tanah untuk ditempati di Beersba setelah proyek irigasi selesai.
6. Penandatanganan perjanjian Pajak antara orang Yahudi dan Palestina atas barang-barang yang paling banyak diimpor.⁵

Pada bulan September 1947 pemerintah Inggris melakukan permintaan kepada komite PBB untuk membentuk sebuah komite khusus yang disebut UNSCOP, *United Nations Special Comiitee On Palestine* (Komisi Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Palestina). Komite tersebut beranggotakan sebelas negara dan tidak termasuk lima anggota negara besar di Dewan Keamanan PBB. Sebelas negara anggota UNSCOP yaitu Australia, Swedia, Kanada, India, Cekoslavia, Iran, Belanda, Guatemala, Peru, Uruguay dan Yugoslavia. Imil Sandostrome yang merupakan Hakim Swedia ditunjuk sebagai kepala di UNSCOP. Pada tanggal 1 Agustus 1947 Inggris mengakhiri mandatnya atas Palestina dengan merekomendasikan pemecahan wilayah mandat tersebut. Komite tersebut menyelesaikan laporannya pada tanggal 31 Agustus 1947 dan mengirimkannya pada Majelis Umum PBB.

⁵Fawzy Al-Ghadiry. *Ibid.*, 72.

Pada tanggal 3 September 1947 UNSCOP berhasil merancang sebuah proposal yang kemudian disampaikan pada Majelis Umum PBB yang berisi tentang upaya untuk membagi wilayah Palestina di akhir masa mandat Inggris. Proposal tersebut kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 29 November 1947 sebagai Resolusi 181 (II) atau *The United Nations Partition Plan For Palestine*. Resolusi tersebut berisi tentang rekomendasi pembagian wilayah Palestina untuk bangsa Arab dan bangsa Yahudi dengan wilayah Yerusalem dan Bethlehem berada dibawah kendali Internasional. Pihak Yahudi mendapatkan wilayah pesisir sekitar Tel Aviv, wilayah sekitar Danau Galilea dan Gurun Negev. Sementara Arab mendapatkan sisa dari wilayah Palestina termasuk enklave kecil di Jaffa sebelah selatan Tel Aviv. Secara keseluruhan Pihak Yahudi mendapatkan 55% wilayah Palestina, sementara Arab mendapatkan 45% wilayah Palestina. Rencana tersebut disetujui oleh sidang Majelis Umum PBB yang disetujui oleh 33 negara, 13 negara menolak dan 10 negara netral.⁶

Pasca resolusi pembagian wilayah Palestina tersebut, Arab Palestina melakukan perlawanan atas aktivitas pemukiman Zionis dengan bantuan negara-negara Arab. Perlawanan ini kemudian meluas di seluruh wilayah Palestina sehingga terjadi pertempuran dengan menggunakan senjata dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Pada peristiwa tersebut Inggris banyak memberikan bantuan pasukan dan senjata untuk Yahudi sehingga banyak penduduk Arab Palestina terusir dari tempat tinggalnya. Dewan keamanan PBB melakukan pertemuan pada tanggal 19 Maret 1948 untuk membahas tentang situasi di Palestina.⁷

Pada tanggal 14 Mei 1948 David Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel tepat pada pukul 6 pagi dan 11 menit kemudian Amerika Serikat menyatakan pengakuan atas berdirinya negara Israel dengan perdana menteri pertamanya David Ben Gurion yang menjabat dari tanggal 17 Mei 1948 hingga

⁶Al-Ghadiry menyampaikan UN Partition Plan For Palestine, bahwa Yahudi mendapatkan 56% wilayah Palestina.

⁷Fawzy Al-Ghadiry. *op.cit.*, 77

tanggal 26 Januari 1954.⁸ Setelah Yahudi mendeklarasikan diri menjadi sebuah negara, pemerintah Israel memfasilitasi imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi menuju Palestina dan mereka menerbitkan aturan yang disebut hukum kembali yang di diratifikasi pada tahun 1950 dan menyampaikan bahwa setiap Yahudi memiliki hak untuk kembali ke negara itu sebagai seorang Yahudi yang sedang kembali pulang.⁹

Kebijakan tersebut berdampak pada nasib warga Palestina yang terusir dari tempat tinggal mereka sejak tahun 1917 hingga setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Pada tanggal 15 Mei 1948 terjadi pengusiran besar-besaran orang Arab Palestina lebih dari 726.000 warga dan yang tertinggal di Palestina sekitar 156.000 Orang.¹⁰ Peristiwa ini dikenal dengan istilah Nakba yang ditimbulkan atas terjadinya perang antara Israel dengan negara-negara Arab yang terdiri dari Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak dan negara arab lainnya. Perang ini terjadi pada tanggal 15 Mei 1948, satu hari setelah diproklamkan berdirinya negara Israel sampai dengan 20 Juli 1949. Namun demikian, peperangan tersebut dimenangkan Israel bahkan dapat merebut kurang lebih 70% wilayah Palestina dari luas total wilayah mandatori PBB. Perang tersebut menyebabkan banyak orang Palestina mengungsi dari wilayah yang dikuasai Israel.¹¹

Al Ghadiry mengungkapkan,¹² sejak tahun 1948 Majelis Umum PBB telah menerbitkan lebih dari lima puluh resolusi dalam menangani masalah pengungsi Palestina. Dari sekian banyak resolusi yang paling urgen dalam penanganan pengungsi Palestina yaitu resolusi 194 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 1948, yang kemudian menjadi hal mendasar dalam pengambilan keputusan resolusi-resolusi berikutnya. Isi dari resolusi tersebut, yaitu:

“Para pengungsi yang ingin kembali ke negara mereka harus diizinkan untuk kembali, dan untuk hidup secara damai dengan tetangga, secepat

⁸bbc.com. https://bit.ly/ben_gurionproklamatorisrael. (Diakses pada tanggal 1 November 2024 pada pukul 14:13)

⁹Fawzy Al-Ghadiry. *op.cit.*, hlm. 96.

¹⁰Fawzy Al-Ghadiry. *Ibid.*, hlm. 105.

¹¹Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Arab-Israel_1948. (diakses pada tanggal 1 November 2024 pada pukul 14:03)

¹²Fawzy Al-Ghadiry. *op.cit.*, hlm. 117-118.

mungkin. Sedangkan orang yang tidak ingin kembali ke negara mereka harus diberi kompensasi atas harta mereka, dan penghancuran dan keruntuhan yang menimpa mereka, dan ini berdasarkan hukum internasional atau prinsip-prinsip keadilan, dan pemerintah-pemerintah atau kewenangan-kewenangan yang bertanggungjawab harus terikat untuk melakukan ini.”

Kemudian PBB membentuk Komisi Konsiliasi Internasional untuk memfasilitasi pemulangan kembali para pengungsi dengan aman dan membayarkan kompensasi pada mereka. Namun demikian keberhasilan terlaksananya resolusi ini bergantung sekali pada upaya kooperatif dari pihak Israel, akan tetapi Pihak Israel tidak menghormati resolusi tersebut.

Al-Ghadiry mengungkapkan, resolusi-resolusi yang diputuskan di PBB mencerminkan perjalanan panjang diplomasi internasional dalam menangani konflik Palestina-Israel sejak 1947 hingga 1984. Secara umum, resolusi ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa tema utama; pembagian wilayah dan status Palestina, gencatan senjata dan perlindungan warga sipil, hak-hak Palestina, serta kecaman terhadap kebijakan Israel di wilayah pendudukan. Pada resolusi 181 (1947) menjadi titik awal dari konflik modern Palestina-Israel. Resolusi ini mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, negara Yahudi dan negara Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Meskipun diterima oleh komunitas internasional, resolusi ini ditolak oleh bangsa Arab karena dianggap tidak adil. Ketidakmampuan PBB dalam memastikan implementasi resolusi ini menjadi akar dari konflik yang masih berlangsung hingga kini. Selain itu, Resolusi 194 (1948) merekomendasikan pemulangan pengungsi Palestina dan menjadikan Yerusalem dalam sistem internasional permanen. Namun, resolusi ini tidak dijalankan secara efektif karena penolakan dari Israel terhadap hak kembali bagi pengungsi Palestina. Resolusi 242 (1967) adalah upaya untuk menciptakan solusi damai pasca Perang Enam Hari. Resolusi ini menekankan prinsip "tanah untuk perdamaian", yaitu Israel diminta mundur dari wilayah yang diduduki sejak 1967 dengan imbalan jaminan keamanan. Namun, hingga kini, pendudukan Israel terus berlanjut tanpa penyelesaian yang konkret.¹³ Dengan kondisi ini, diplomasi

¹³Fawzy Al-Ghadiry, *Ibid.*, hlm. 119-125.

internasional, khususnya melalui forum multilateral seperti OKI dan Gerakan Non-Blok, perlu diperkuat untuk terus menekan Israel dan mendukung hak Palestina. Selain itu, peran negara-negara seperti Indonesia dalam mendukung Palestina di berbagai forum internasional juga sangat krusial untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.

Pusat Informasi Nasional Palestina mengungkapkan para pengungsi Palestina tersebar di negara-negara yang berbatasan dengan tanah air mereka. Pada tahun 1998 jumlah warga Palestina sebanyak kira-kira 7.788.185 jiwa dan 54% nya tinggal di luar Palestina. Mereka tinggal berkelompok di negara-negara Arab yang berbatasan dengan Palestina, mayoritas mereka tinggal di Yordania, Suriah dan Libanon. Pengungsi Palestina menurut data yang disampaikan UNWRA pada tanggal 30 Juni 2001, terdapat 3.874.738 jiwa, yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, ada sekitar 1.235.315 jiwa (31,9%) tinggal di kamp pengungsi dan 2.639.423 jiwa (68,1%) tinggal di luar kamp pengungsi. Data tersebut mencerminkan sebagian besar pengungsi Palestina telah menetap di luar kamp pengungsi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan di negara-negara yang mereka tinggali. Jumlah pengungsi terbesar berada di Yordania yaitu 1.639.718 jiwa dengan komposisi 287.951 jiwa (17,6%) tinggal di kamp pengungsi, sedangkan 1.351.767 jiwa (82,4%) tinggal di luar kamp. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Yordania yang relatif lebih ramah terhadap pengungsi Palestina dibandingkan negara lain. Banyak dari mereka diberikan kewarganegaraan, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk tinggal di luar kamp pengungsi dan berintegrasi dengan masyarakat lokal.¹⁴

Berbeda dengan Yordania, di Lebanon, jumlah pengungsi di kamp (214.728 jiwa atau 56,1%) lebih besar dibandingkan yang tinggal di luar kamp (168.245 jiwa atau 43,9%) dengan total jumlah pengungsi sebanyak 382.973 jiwa. Hal ini karena Lebanon memiliki kebijakan yang lebih restriktif terhadap pengungsi Palestina, termasuk pembatasan hak kewarganegaraan, pekerjaan, dan kepemilikan tanah. Akibatnya, banyak pengungsi tetap tinggal di kamp pengungsi karena akses mereka

¹⁴Fawzy Al-Ghadiry, *ibid.*, hlm. 119-125.

ke perumahan dan pekerjaan sangat terbatas. Sementara di suriah terdapat 391.651 dengan mayoritas pengungsi Palestina di Suriah tinggal di luar kamp, yaitu 282.185 jiwa (72,1%), sementara 109.466 jiwa (27,9%) tinggal di kamp. Sebelum konflik Suriah pecah, pengungsi Palestina di negara ini memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan publik dan pekerjaan dibandingkan di Lebanon. Namun, perang saudara yang terjadi sejak 2011 memperburuk kondisi mereka, menyebabkan banyak pengungsi kehilangan tempat tinggal dan mengungsi lagi. Sementara itu di Tepi Barat terdapat 607.770 pengungsi dengan rincian sebanyak 163.139 jiwa (26,8%) tinggal di kamp pengungsi, sedangkan 444.631 jiwa (73,2%) tinggal di luar kamp. Meskipun Tepi Barat merupakan wilayah Palestina sendiri, banyak pengungsi tetap tinggal di kamp karena konflik yang berkepanjangan dan keterbatasan akses ekonomi. Pemukiman Israel yang terus berkembang di Tepi Barat juga membatasi ruang hidup mereka. Terakhir pengungsi di Jalur Gaza sebanyak 852.626 jiwa. Jalur Gaza memiliki jumlah pengungsi di kamp terbesar dibanding wilayah lain, yaitu 460.031 jiwa (53,9%) dan 392.595 jiwa (46,1%) tinggal di luar kamp. Tingginya angka pengungsi yang masih tinggal di kamp mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang sangat sulit di Gaza, ditambah dengan blokade Israel yang membatasi pergerakan barang dan orang. Wilayah yang kecil dan padat membuat banyak pengungsi tetap tinggal di kamp dengan fasilitas yang sangat terbatas.

Isu kemerdekaan Palestina telah menjadi salah satu perhatian utama dalam politik internasional, khususnya bagi negara-negara Muslim dan negara yang mendukung hak asasi manusia. Sejak pertengahan abad ke-20 Palestina mengalami konflik berkepanjangan dengan Israel. Palestina saat ini masih berjuang untuk meraih kedaulatan penuh sebagai negara merdeka yang diakui dunia internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia paling konsisten dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Hal ini terlihat dari bagaimana peran diplomasi Indonesia di forum-forum Internasional baik di sidang umum PBB, OKI, maupun di forum ASEAN.

Dalam konstitusi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik yang bebas aktif.

Bebas berarti bahwa tidak terikat oleh sebuah ideologi atau politik negara asing maupun blok-blok negara tertentu. Sedangkan Aktif berarti bahwa berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta mengembangkan prinsip kebebasan, persamaan, kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara-negara lain.¹⁵

Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukanlah sebuah kebijakan yang muncul tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari sikap historis yang telah terbangun sejak awal kemerdekaan Indonesia. Palestina, melalui tokoh muftinya yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, merupakan salah satu pihak pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia secara terbuka pada tahun 1945. Dukungan tersebut membentuk dasar solidaritas historis yang mendalam antara kedua bangsa. Presiden Soekarno menegaskan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan di Palestina.¹⁶

Secara ideologis, politik luar negeri Indonesia dilandasi oleh prinsip bebas aktif, yang mendorong keterlibatan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan keadilan global. Prinsip ini membuat Indonesia sejak awal menempatkan isu Palestina sebagai bagian dari tanggung jawab moral bangsa terhadap penindasan dan kolonialisme. Dalam berbagai forum internasional seperti Konferensi Asia-Afrika 1955, Indonesia secara tegas menyuarakan pembelaan terhadap Palestina sebagai bangsa yang terjajah. Sikap ini terus berlanjut di berbagai era pemerintahan, menjadikan dukungan terhadap Palestina bukan sekadar kebijakan luar negeri, tetapi cerminan dari nilai dasar ideologis bangsa Indonesia.¹⁷

Dalam konteks kontemporer, posisi Indonesia tetap konsisten mendukung solusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum 1967, serta mengecam segala bentuk aneksasi dan kekerasan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Pemerintah

¹⁵Rezki Satris, *Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel* (POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam. Vol. 2 No. 2 Tahun 2019), hlm. 161.

¹⁶Azyumardi Azra, *Indonesia dan Dunia Islam: Refleksi Historis dan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 156.

¹⁷Departemen Luar Negeri RI, *Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif* (Jakarta: Kemenlu RI, 2003), hlm. 12–14.

Indonesia aktif menggunakan jalur diplomasi bilateral maupun multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok. Konsistensi ini memperlihatkan bahwa isu Palestina telah menjadi bagian dari identitas diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kedaulatan bangsa-bangsa.¹⁸

Lebih jauh, keberpihakan Indonesia terhadap Palestina juga diperkuat oleh aspirasi masyarakat sipil Indonesia yang secara luas menunjukkan solidaritas melalui aksi massa, kampanye kemanusiaan, dan diplomasi publik. Hal ini menjadikan isu Palestina tidak hanya bersifat kenegaraan, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Dengan latar belakang historis, ideologis, dan sosial tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk dan efektivitas upaya diplomatik Pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dalam kurun satu dekade terakhir (2014–2024).

Isu Palestina menempati posisi penting dalam politik luar negeri Indonesia karena merupakan pengejawantahan dari prinsip dasar politik luar negeri “bebas aktif” yang dianut sejak masa kemerdekaan. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berarti tidak memihak blok kekuatan tertentu, tetapi secara aktif mendukung perjuangan bangsa-bangsa untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Dalam konteks ini, Palestina merupakan simbol perjuangan bangsa tertindas yang hingga kini belum mendapatkan hak-haknya secara penuh sebagai negara merdeka. Oleh karena itu, mendukung Palestina adalah bagian dari konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan keadilan global.¹⁹

Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia telah menjadikan isu Palestina sebagai prioritas diplomatik. Dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung, Palestina diakui sebagai bangsa yang berhak untuk merdeka dan mendapat dukungan dari negara-negara peserta. Sejak saat itu, posisi Indonesia terhadap Palestina tidak berubah: tegas menolak penjajahan Israel dan terus memperjuangkan hak rakyat Palestina atas tanah airnya sendiri. Ini menandakan

¹⁸Retno L.P. Marsudi, *Pidato di Sidang Umum PBB ke-75*, 2020, diakses melalui situs resmi Kemlu RI: www.kemlu.go.id

¹⁹Departemen Luar Negeri RI, *Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif* (Jakarta: Kemenlu RI, 2003), hlm. 12.

bahwa dukungan terhadap Palestina tidak bersifat situasional, tetapi telah menjadi bagian integral dari prinsip dan arah politik luar negeri Indonesia. Selain bersifat historis dan ideologis, pentingnya isu Palestina juga berkaitan dengan posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memainkan peran penting dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam setiap pertemuan OKI, Indonesia selalu berada di barisan depan dalam menyerukan penyelesaian konflik Palestina secara adil dan damai. Peran aktif ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara Muslim yang berkomitmen pada isu-isu kemanusiaan global.²⁰

Dalam konteks multilateralisme, Indonesia terus menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dalam forum-forum internasional, termasuk di Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, hingga Gerakan Non-Blok (GNB). Indonesia kerap menyampaikan kecaman terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Israel dan menyerukan dukungan terhadap solusi dua negara sebagai bentuk penyelesaian damai yang adil. Bahkan dalam masa keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB (2019–2020), Indonesia menjadikan Palestina sebagai salah satu prioritas diplomatiknya.²¹

Lebih dari sekadar solidaritas, dukungan terhadap Palestina mencerminkan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia. Isu Palestina juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Muslim, dunia Global South, dan komunitas internasional secara umum. Oleh sebab itu, komitmen Indonesia terhadap Palestina bukan hanya penting secara politik, tetapi juga strategis bagi citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam politik luar negerinya.²²

Kurun waktu 2014 hingga 2024 merupakan satu dekade yang penting dan strategis dalam melihat dinamika politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam

²⁰Riza Sihbudi, *Islam dan Politik Internasional di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2009), hlm. 89.

²¹Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja 2020*, diakses dari www.kemlu.go.id.

²²Dewi Fortuna Anwar, "Indonesia's Foreign Policy and the Struggle for Palestine," dalam *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 15–16.

mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Periode ini mencakup dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang memiliki pendekatan tersendiri dalam diplomasi luar negeri dengan tetap mempertahankan prinsip bebas aktif dan penekanan pada peran Indonesia sebagai negara dengan misi kemanusiaan global. Perubahan gaya kepemimpinan, serta dinamika global yang terjadi pada periode ini, menjadikan rentang waktu ini relevan untuk dianalisis secara mendalam.²³

Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo memulai masa jabatan pertamanya dengan memperkuat kebijakan luar negeri berbasis “diplomasi kemanusiaan” yang menjadikan Palestina sebagai salah satu isu prioritas. Hal ini terlihat dari berbagai pernyataan politik, partisipasi aktif Indonesia di forum internasional, serta peran aktif Indonesia di Dewan Keamanan PBB (2019–2020) yang secara eksplisit memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.²⁴ Perubahan penting dalam tataran global juga turut mewarnai periode ini, terutama kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Pada tahun 2017, Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS ke kota tersebut. Keputusan ini memicu protes internasional termasuk dari Indonesia yang secara tegas menolak langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB.²⁵

Di sisi lain, periode ini juga memperlihatkan intensifikasi kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Beberapa serangan besar terjadi pada tahun 2014, 2018, 2021, dan 2023, menyebabkan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur besar-besaran. Dalam konteks ini, Indonesia memainkan peran penting dalam menyerukan penghentian kekerasan dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Dukungan ini diberikan baik melalui diplomasi formal maupun melalui gerakan masyarakat sipil.²⁶ Dalam tataran domestik, kurun waktu ini juga menunjukkan sinergi yang lebih kuat antara negara dan masyarakat

²³Dewi Fortuna Anwar, *"Indonesia's Foreign Policy in the Post-Reformasi Era,"* dalam *Southeast Asian Affairs*, 2016, hlm. 129.

²⁴Retno L.P. Marsudi, *Annual Press Statement of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*, 2020, diakses melalui www.kemlu.go.id.

²⁵BBC Indonesia, *"Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel: Indonesia Kutuk Keputusan AS,"* 7 Desember 2017.

²⁶Al Jazeera, *"Israel-Palestine Conflict: Timeline of Major Escalations,"* 2023.

dalam isu Palestina. Maraknya solidaritas publik di Indonesia melalui aksi bela Palestina, penggalangan dana, hingga diplomasi publik melalui media sosial menjadi kekuatan tambahan dalam memperkuat posisi resmi negara. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya bersifat vertikal antar negara, tetapi juga horizontal melalui kekuatan masyarakat sipil.²⁷

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), dan ASEAN selama satu dekade terakhir juga memperkuat relevansi analisis ini. Dalam forum-forum tersebut, Indonesia secara konsisten mengangkat isu Palestina dan mendorong komunitas internasional untuk menghormati prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.²⁸ Keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019–2020 menjadi momentum diplomatik penting. Indonesia mendorong penguatan implementasi Resolusi PBB terkait Palestina serta menolak rencana aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel. Indonesia juga mendesak perlindungan internasional bagi rakyat Palestina, sebuah posisi yang mendapatkan apresiasi luas dari negara-negara berkembang.²⁹

Kurun waktu 2014–2024 juga menjadi periode penting karena menandai titik balik pergeseran geopolitik di Timur Tengah, termasuk normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel melalui *Abraham Accords*. Indonesia tetap berkomitmen pada prinsip “tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum kemerdekaan penuh Palestina diakui,” sehingga tetap menjaga konsistensi arah kebijakannya di tengah tekanan dan perubahan regional.³⁰ Secara normatif, periode ini memperlihatkan konsistensi Indonesia dalam menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara dan penegakan hukum internasional. Dalam setiap pidato di forum internasional, baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu mencantumkan isu Palestina sebagai bagian dari agenda diplomatik. Retorika tersebut bukan sekadar simbolik, tetapi dibarengi

²⁷Imdadun Rahmat, “Solidaritas Publik Indonesia terhadap Palestina,” dalam *Jurnal Islam dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2021.

²⁸OKI, *Final Communiqué of the OIC Extraordinary Summit on Palestine*, 2017.

²⁹Kementerian Luar Negeri RI, *Laporan Kinerja Kemlu 2020*, diakses melalui www.kemlu.go.id.

³⁰The Guardian, “*Abraham Accords Explained: What Normalisation Means*,” 2020.

dengan langkah nyata seperti bantuan rumah sakit, beasiswa, dan dukungan resolusi PBB.³¹

Dengan demikian, periode 2014–2024 adalah rentang waktu yang representatif untuk mengkaji secara kritis dan konstruktif bentuk, arah, serta efektivitas diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Periode ini tidak hanya mencerminkan kontinuitas kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga menggambarkan respons Indonesia terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Kajian terhadap periode ini akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi hubungan internasional Indonesia dan solidaritas global untuk Palestina.³²

Ketertarikan peneliti dalam mengangkat topik diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina didasari oleh keyakinan bahwa isu Palestina bukan semata-mata isu politik luar negeri, melainkan juga representasi dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas global yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Isu ini telah menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan modern dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung di abad ke-21. Peneliti merasa bahwa penting untuk terus mengkaji secara ilmiah bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan sejarah panjang anti-kolonialisme, memposisikan dirinya dalam perjuangan ini melalui jalur diplomasi.

Selain itu, peneliti melihat adanya celah kajian dalam menelaah secara khusus upaya diplomasi Indonesia terhadap Palestina dalam satu dekade terakhir, yaitu 2014 hingga 2024, yang mencakup dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rentang waktu ini merupakan fase penting yang memperlihatkan dinamika baru dalam politik internasional dan regional, seperti perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel, serta meningkatnya kesadaran masyarakat sipil Indonesia dalam

³¹United Nations General Assembly, *Statements by Indonesia on Palestine Question, 2019–2023*

³²Riza Sihbudi, *Islam dan Politik Internasional di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2009), hlm. 101–103.

mendukung Palestina. Semua perkembangan tersebut memberikan konteks yang kaya dan relevan untuk diteliti secara akademik.

Lebih jauh, peneliti memiliki latar belakang akademik dan aktivisme kemanusiaan yang berkaitan erat dengan isu-isu Timur Tengah dan Palestina, yang semakin memperkuat motivasi untuk mengangkat tema ini sebagai bahan kajian ilmiah. Dengan mengangkat topik ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hubungan internasional di Indonesia, sekaligus memperkuat basis argumentatif dan moral bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada kemerdekaan dan keadilan global, khususnya bagi rakyat Palestina.

Penelitian ini memiliki sisi kebaruan (*novelty*) yang terletak pada fokus kajiannya terhadap periode satu dekade terakhir (2014–2024), sebuah rentang waktu yang belum banyak diteliti secara spesifik dalam konteks diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Sebagian besar kajian sebelumnya masih berpusat pada era Soekarno atau pada tinjauan umum kebijakan luar negeri Indonesia tanpa menyoroti dinamika aktual dalam sepuluh tahun terakhir yang sangat dipengaruhi oleh berbagai perubahan geopolitik internasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan literatur tersebut dengan pendekatan historis-kritis dan kontekstual.

Kebaruan lainnya adalah pendekatan yang digunakan untuk memadukan antara diplomasi formal negara (*track one diplomacy*) dengan gerakan masyarakat sipil sebagai aktor pendukung diplomasi publik Indonesia dalam isu Palestina. Hal ini penting, mengingat dalam dekade terakhir, solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina memainkan peran signifikan dalam memperkuat posisi diplomatik pemerintah di berbagai forum internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membatasi analisis pada tataran elit diplomatik, tetapi juga membuka ruang pembacaan baru terhadap kontribusi kekuatan non-negara dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Penelitian ini juga menempatkan Palestina sebagai bagian dari “diplomasi kemanusiaan” Indonesia, yang semakin diperkuat sejak era Presiden Joko Widodo. Dengan membaca diplomasi Indonesia bukan hanya dalam kerangka politik dan

keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan dan moralitas global, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang lebih humanistik dalam studi hubungan internasional. Pendekatan ini memperkaya kajian diplomasi Indonesia yang selama ini lebih banyak berfokus pada isu ekonomi dan regionalisme ASEAN. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan kritis terhadap efektivitas diplomasi Indonesia di tengah pergeseran posisi beberapa negara Islam yang mulai menormalisasi hubungan dengan Israel. Dalam situasi tersebut, penelitian ini akan menyoroti bagaimana Indonesia menjaga konsistensi posisinya sekaligus mencari celah strategi yang tetap relevan di tengah perubahan konstelasi internasional. Analisis ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah sekaligus praktis bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan yang lebih kokoh, konsisten, dan berpengaruh dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Penelitian mengenai diplomasi Indonesia terhadap Palestina telah dilakukan oleh beberapa akademisi, baik dari disiplin hubungan internasional, ilmu politik, maupun kajian Timur Tengah. Sebagian besar dari penelitian tersebut menekankan konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina sejak masa Presiden Soekarno hingga kini. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Riza Sihbudi (2009) menekankan bahwa posisi Indonesia terhadap Palestina tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan politik, tetapi juga bersumber dari ikatan ideologis dan historis yang kuat sejak masa kemerdekaan.³³

Penelitian oleh Siti Mutmainnah (2017) dalam tesisnya di Universitas Gadjah Mada mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung Palestina melalui pendekatan konstruktivisme. Ia menyimpulkan bahwa identitas Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan warisan historis perjuangan anti-kolonial menjadi faktor yang mendorong konsistensi diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Namun, penelitiannya belum secara khusus membahas dinamika terbaru yang terjadi pada dekade 2014–2024, terutama setelah munculnya peristiwa global

³³Riza Sihbudi, *Islam dan Politik Internasional di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2009), hlm. 95–100.

seperti pengakuan Yerusalem oleh AS sebagai ibu kota Israel dan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.³⁴

Sementara itu, studi oleh Dina Yuliana (2020) dalam jurnal *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* menganalisis peran Indonesia dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mendukung Palestina. Ia menemukan bahwa Indonesia memanfaatkan jalur multilateral secara aktif untuk membangun dukungan internasional terhadap Palestina, terutama dalam mendesak penghentian kekerasan dan pembangunan negara Palestina yang merdeka. Namun, pendekatan studi ini belum memasukkan unsur diplomasi publik dan keterlibatan masyarakat sipil Indonesia sebagai kekuatan penunjang diplomasi negara.³⁵ Terdapat pula penelitian dari Andika Ramadhan (2021) yang menyoroti pendekatan diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap Palestina dengan fokus pada bantuan konkret seperti pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Penelitian ini cukup memberikan gambaran tentang diplomasi berbasis aksi kemanusiaan, tetapi belum mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam analisis yang komprehensif mengenai strategi politik luar negeri dalam satu dekade terakhir.³⁶

Dengan demikian, dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar belum mengkaji secara menyeluruh upaya diplomatik Indonesia dalam mendukung Palestina dalam kurun 2014–2024, baik dari sisi konteks perubahan geopolitik global, dinamika internal politik luar negeri Indonesia, maupun keterlibatan aktor non-negara. Hal ini menunjukkan adanya ruang kajian yang masih terbuka luas dan penting untuk diisi oleh penelitian ini.

³⁴Siti Mutmainnah, *"Konstruktivisme dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina,"* Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, 2017.

³⁵Dina Yuliana, *"Peran Indonesia dalam Forum OKI untuk Mendukung Palestina,"* *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 12, No. 1 (2020): 55–67.

³⁶Andika Ramadhan, *"Diplomasi Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina: Studi Kasus Rumah Sakit Indonesia di Gaza,"* *Jurnal Kajian Global*, Vol. 5, No. 2 (2021): 134–145.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina selama periode 2014–2024?
2. Bagaimana strategi diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina selama periode 2014–2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian upaya diplomatik Pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina 2014-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis Langkah diplomatik Indonesia terhadap Palestina
2. Mengungkap efektivitas diplomasi Indonesia terhadap Palestina

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian sejarah peran diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina 2014-2024 memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - 1) Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang Sejarah peran diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Bangsa Palestina.
 - 2) Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai teori diplomasi khususnya diplomasi negara berkembang dan diplomasi kemanusiaan.
 - 3) Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan peneliti dalam kajian hubungan internasional dan studi timur Tengah, khususnya terkait peran Indonesia dalam isu Palestina.
 - 4) Penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman tentang strategi diplomasi multilateral dan bilateral yang diterapkan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri, sebagai bahan evaluasi atau pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina atau negara-negara lain yang menghadapi situasi serupa.
- 2) Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang alasan dan strategi yang diterapkan Indonesia dalam mendukung Palestina.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para diplomat dan profesional di bidang hubungan internasional dalam menjalankan tugas diplomatik terkait isu kemerdekaan bangsa atau hak asasi manusia.
- 4) Penelitian ini mendukung usaha Indonesia untuk memperkuat citranya sebagai negara yang proaktif dalam mendukung perdamaian dan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, khususnya melalui diplomasi kemanusiaan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam studi hubungan internasional, diplomasi secara tradisional didefinisikan sebagai praktik komunikasi dan negosiasi antarnegara yang dilakukan oleh aktor resmi, terutama pemerintah melalui kementerian luar negeri atau kedutaan besar. Diplomasi tradisional (track one diplomacy) dijalankan secara formal, tertutup, dan bersifat institusional, dengan tujuan utama menjaga hubungan bilateral, menyelesaikan konflik, dan memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, diplomasi Indonesia terhadap Palestina banyak diwujudkan melalui keikutsertaan dalam forum multilateral seperti PBB, OKI, dan GNB, serta penguatan hubungan bilateral dengan otoritas Palestina.³⁷

Namun, dalam perkembangan hubungan internasional kontemporer, konsep diplomasi telah mengalami perluasan melalui munculnya diplomasi publik. Diplomasi publik merujuk pada upaya negara untuk berkomunikasi secara langsung

³⁷Harold Nicolson, *Diplomacy* (Oxford University Press, 1963), hlm. 13–17.

dengan masyarakat asing guna mempengaruhi opini publik internasional dan membangun citra positif negara. Diplomasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga aktor non-negara seperti LSM, media, akademisi, dan masyarakat sipil.³⁸

Dalam konteks Palestina, diplomasi publik Indonesia tampak dari berbagai kampanye kemanusiaan, penggalangan solidaritas publik, hingga penggunaan media sosial oleh pejabat negara untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Perbedaan utama antara diplomasi tradisional dan diplomasi publik terletak pada saluran komunikasi dan audiens yang disasar. Jika diplomasi tradisional berorientasi pada komunikasi antar elite, maka diplomasi publik lebih bersifat horizontal dan bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Hal ini membuat diplomasi publik menjadi strategi penting dalam memperluas pengaruh moral dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam isu global seperti konflik Palestina yang memerlukan dukungan lintas negara dan lintas sektor.³⁹

Dengan memadukan pendekatan diplomasi tradisional dan diplomasi publik, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Diplomasi formal tetap menjadi jalur utama dalam pengambilan keputusan internasional, sedangkan diplomasi publik menjadi pelengkap strategis untuk membangun opini global dan tekanan moral terhadap kekuatan besar yang mendukung penjajahan Israel. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif diplomasi tradisional dan diplomasi publik sebagai landasan teoritik dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina selama periode 2014–2024.⁴⁰

Dalam memahami dinamika hubungan antarnegara, termasuk dalam konteks dukungan diplomatik Indonesia terhadap Palestina, teori-teori hubungan internasional memberikan kerangka analitis yang penting. Tiga pendekatan utama dalam teori hubungan internasional—realisme, liberalisme, dan konstruktivisme—

³⁸Nicholas J. Cull, "Public Diplomacy: Taxonomies and Histories," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 616, No. 1 (2008): 31–54.

³⁹Jan Melissen (ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 5–8.

⁴⁰Alexander Graf Lambsdorff, "Modern Diplomacy: Combining Traditional and Public Approaches," *Global Affairs Journal*, Vol. 4, No. 2 (2017): 22–28.

menawarkan perspektif yang berbeda dalam melihat motivasi, strategi, dan perilaku negara dalam sistem internasional.

Dalam studi hubungan internasional, realisme merupakan teori klasik yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang anarkis. Realisme memandang bahwa setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan kalkulasi kekuasaan untuk mempertahankan kedaulatannya. Konflik dianggap sebagai hal yang inheren dalam sistem internasional karena tidak adanya otoritas tertinggi yang mampu mengatur perilaku negara secara absolut. Dalam konteks isu Palestina, pendekatan realis akan melihat konflik Israel–Palestina sebagai perebutan wilayah dan kekuasaan, serta dominasi kekuatan besar yang mendukung kepentingan nasionalnya masing-masing.⁴¹

Berbeda dari realisme, liberalisme menawarkan pandangan yang lebih optimistik terhadap hubungan internasional. Teori ini percaya bahwa kerja sama antarnegara dimungkinkan melalui institusi internasional, hukum internasional, dan nilai-nilai demokrasi. Negara tidak hanya didorong oleh kepentingan kekuasaan, tetapi juga oleh dorongan untuk menciptakan perdamaian dan keteraturan global. Dalam kerangka liberal, diplomasi Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menciptakan tatanan internasional yang damai dan adil, melalui kerja sama di PBB, OKI, dan forum multilateral lainnya.⁴²

Selain itu, liberalisme juga menekankan pentingnya aktor non-negara seperti LSM, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam mendorong perubahan global. Hal ini sejalan dengan karakteristik diplomasi Indonesia yang tidak hanya mengandalkan saluran formal, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam membangun solidaritas global terhadap Palestina. Kerja sama pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan advokasi HAM menjadi instrumen penting dalam diplomasi yang berlandaskan prinsip liberal.⁴³

⁴¹Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 7th ed. (New York: McGraw-Hill, 2006), hlm. 4–9.

⁴²Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Boston: Little, Brown, 1977), hlm. 24–35.

⁴³Andrew Moravcsik, "Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics," *International Organization*, Vol. 51, No. 4 (1997): 513–553.

Sementara itu, konstruktivisme menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan bahwa realitas politik internasional dibentuk oleh ide, norma, dan konstruksi sosial. Konstruktivisme memandang bahwa identitas, persepsi, dan nilai-nilai budaya mempengaruhi tindakan negara dalam sistem internasional. Dalam kerangka ini, sikap Indonesia terhadap Palestina tidak hanya ditentukan oleh kalkulasi kepentingan atau institusi, tetapi juga oleh identitas historis Indonesia sebagai bangsa anti-kolonial dan negara dengan mayoritas Muslim.⁴⁴

Dengan demikian, ketiga teori ini dapat digunakan secara komplementer dalam menganalisis diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Realisme membantu menjelaskan posisi Indonesia dalam peta kekuatan global; liberalisme menerangkan peran Indonesia dalam sistem kerja sama internasional; sedangkan konstruktivisme menjelaskan latar normatif dan identitas ideologis Indonesia yang mempengaruhi pilihan kebijakan luar negerinya. Pemahaman ketiganya menjadi kerangka analisis teoritik yang penting dalam penelitian ini untuk membedah kompleksitas hubungan diplomatik Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Palestina.⁴⁵

Solidaritas global merupakan konsep yang menekankan pada pentingnya rasa tanggung jawab kolektif antarbangsa dalam menghadapi ketidakadilan, krisis kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap saling ketergantungan antarnegara dalam sistem internasional modern, serta dorongan moral untuk bertindak demi kebaikan bersama umat manusia. Solidaritas global melampaui batas-batas geografis dan politik, serta menjadi dasar normatif dalam berbagai tindakan kolektif internasional, termasuk dalam mendukung perjuangan kemerdekaan dan keadilan bagi bangsa yang tertindas.⁴⁶

Dalam konteks perjuangan Palestina, solidaritas global memainkan peran penting dalam mempertahankan dukungan internasional terhadap hak-hak rakyat

⁴⁴Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics," *International Organization*, Vol. 46, No. 2 (1992): 391–425.

⁴⁵Stephanie Lawson, *Theories of International Relations: Contending Approaches to World Politics* (Cambridge: Polity Press, 2015), hlm. 82–115.

⁴⁶Thomas Pogge, *World Poverty and Human Rights* (Cambridge: Polity Press, 2008), hlm. 112–115.

Palestina. Meskipun belum merdeka secara de facto maupun de jure, Palestina telah memperoleh pengakuan diplomatik dari lebih dari 130 negara dan mendapatkan status sebagai "Negara Pengamat Non-Anggota" di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2012. Dukungan ini mencerminkan bentuk nyata solidaritas global, terutama dari negara-negara Global South yang memiliki pengalaman kolonialisme dan mendukung prinsip keadilan internasional.⁴⁷

Salah satu prinsip hukum internasional yang relevan dalam hal ini adalah hak penentuan nasib sendiri (right to self-determination), yang dijamin dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (2) dan ditegaskan kembali dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) Tahun 1960 tentang Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Terjajah. Hak ini memberikan legitimasi kepada bangsa-bangsa untuk menentukan status politik mereka sendiri tanpa campur tangan asing, serta mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.⁴⁸ Dalam konteks Palestina, hak ini belum sepenuhnya terealisasi akibat pendudukan militer Israel dan pengingkaran terhadap batas-batas wilayah berdasarkan Resolusi PBB.

Solidaritas global terhadap Palestina juga terwujud dalam berbagai bentuk: mulai dari pernyataan politik di forum internasional, bantuan kemanusiaan, hingga gerakan masyarakat sipil global yang menyerukan penghentian penjajahan dan pengakuan penuh terhadap negara Palestina. Negara-negara seperti Indonesia memosisikan solidaritas terhadap Palestina bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen ideologis terhadap penegakan hak asasi manusia dan penolakan terhadap penjajahan dalam bentuk apapun.⁴⁹

Dengan demikian, konsep solidaritas global dan hak penentuan nasib sendiri menjadi dua pilar penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Keduanya memberikan landasan moral, hukum, dan politik bagi komunitas internasional untuk terus menekan kekuatan kolonial agar menghormati hak-hak

⁴⁷United Nations General Assembly, "Resolution 67/19: Status of Palestine in the United Nations," 29 November 2012.

⁴⁸United Nations, *Charter of the United Nations, Article 1(2); UNGA Resolution 1514 (XV), "Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,"* 1960.

⁴⁹Kementerian Luar Negeri RI, *Sikap Politik Indonesia terhadap Palestina*, www.kemlu.go.id, diakses Mei 2025.

dasar rakyat Palestina. Dalam konteks penelitian ini, kedua konsep tersebut menjadi kerangka normatif untuk menilai sejauh mana Indonesia sebagai bagian dari komunitas global telah berkontribusi secara diplomatik dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.⁵⁰

1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

1. Disertasi yang berjudul “*Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia (Studi Diplomasi Pemerintahan Era Reformasi 1998-2018 dalam Upaya penyelesaian Konflik Israel-Palestina)*” yang ditulis oleh Masyrofah. Kelebihan disertasi ini terletak pada penelitian yang memberikan analisis komprehensif mengenai pergeseran kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina pada era reformasi, termasuk pola diplomasi yang diterapkan, namun demikian disertasi ini baru membahas rentang waktu 1998-2018 dan disertasi lebih berfokus pada perspektif pemerintah Indonesia, sehingga pandangan dari pihak lain, seperti masyarakat sipil atau aktor non-negara, mungkin kurang terwakili, sehingga terbuka bagi peneliti melanjutkannya dalam bentuk tesis, terutama tentang dukungan diplomatik pemerintah Indonesia terhadap Palestina. Disertasi ini tentu bermanfaat bagi peneliti untuk membahas sejarah diplomasi Indonesia pada topik upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina 2014-2024.
2. Skripsi yang berjudul “*Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina*” yang ditulis Syahnaz Shafira Adira. Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan teori konstruktivisme yang berfokus pada pembentukan identitas, nilai, dan norma dalam hubungan internasional, serta pendekatan soft power oleh Joseph S. Nye. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis diplomasi Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip anti-kolonialisme, namun demikian penelitian ini datanya sebagian besar diperoleh melalui laman resmi pemerintah, media, dan literatur ilmiah. Keterbatasan akses terhadap data primer, seperti wawancara langsung dengan diplomat atau pejabat terkait, dapat mempengaruhi kedalaman analisis, selain itu penelitian

⁵⁰Richard Falk, *Palestine: The Legitimacy of Hope* (Just World Books, 2014), hlm. 35–40.

ini berfokus pada periode setelah 2015 dan tidak menggambarkan upaya diplomasi pada masa periode sebelumnya, sehingga masih terbuka bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis. Secara keseluruhan, skripsi ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui pendekatan soft power.

3. Jurnal yang berjudul "*Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina*" yang ditulis Syarif Bahaudin Mudore. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada uraian penjelasan berbagai peran yang dimainkan Indonesia, termasuk sebagai *co-sponsor*, *fasilitator*, *mediator*, partisipan, *inisiator*, *aktor*, *motivator*, dan *justifikator* dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina, namun demikian jurnal ini tampaknya lebih banyak mengandalkan sumber sekunder, sehingga mungkin kurang menghadirkan wawasan dari data primer seperti wawancara dengan diplomat atau pejabat terkait. Berdasarkan hal tersebut masih terbuka bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis. Jurnal ini tentu memberikan manfaat bagi peneliti tentang peran diplomasi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina pada topik penelitian upaya diplomatik pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina periode 2014-2024.
4. Jurnal yang berjudul "*Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel*" yang ditulis oleh Rezki Satris. Kelebihan penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal, koran, buku, dan situs web resmi, untuk mendukung analisis yang komprehensif. Namun demikian, penelitian ini tampaknya lebih banyak mengandalkan sumber sekunder, tanpa melibatkan data primer seperti wawancara dengan diplomat atau pejabat terkait, yang dapat memperkaya analisis, sehingga masih terbuka bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian dalam bentuk tesis. Jurnal ini tentu bermanfaat bagi peneliti tentang peran politik luar negeri Indonesia dalam menanggapi pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

5. Jurnal dengan judul *“Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina”* yang ditulis Novan Prasetya dan Aulia Srifauzi. Kelebihan jurnal ini terletak pada uraian penjelasan secara rinci berbagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia, baik melalui forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun melalui kebijakan politik luar negeri yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Namun demikian, penelitian ini tampaknya lebih banyak mengandalkan sumber sekunder, seperti jurnal, buku, dan situs web resmi, tanpa melibatkan data primer seperti wawancara dengan diplomat atau pejabat terkait. Hal ini dapat membatasi kedalaman analisis terkait implementasi kebijakan diplomasi Indonesia, sehingga masih terbuka bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian dalam bentuk tesis. Jurnal ini tentu bermanfaat bagi peneliti tentang komitmen dan peran aktif Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui diplomasi politik.
6. Jurnal dengan judul *“Sikap Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Perpindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem di PBB (2014-2019)”* yang ditulis Adettia Gamma. Kelebihan jurnal ini terletak pada penjelasan menyoroti konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang anti-kolonial dan pro-perdamaian, serta bagaimana Indonesia menggunakan pendekatan *soft power* atau diplomasi dalam mendukung Palestina. Namun demikian, Jurnal ini memiliki Keterbatasan akses terhadap data primer, seperti wawancara dengan diplomat atau pejabat terkait, dapat mempengaruhi kedalaman analisis, sehingga masih memungkinkan peneliti untuk melanjutkan penelitian dalam bentuk tesis. Jurnal ini tentu memberikan manfaat bagi peneliti terutama tentang sikap dan peran Indonesia dalam menanggapi perpindahan ibu kota Israel ke Yerusalem.
7. Makalah dengan judul *“Strategi Diplomasi Indonesia di Era Joko Widodo dalam Upaya Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina”* yang ditulis oleh Hartanto. Kelebihan makalah ini terletak pada analisis secara komprehensif kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina selama pemerintahan Joko Widodo. Namun demikian, makalah ini tidak

menyebutkan sumber secara spesifik, dengan demikian masih terbuka bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis.

8. Jurnal yang berjudul “*Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Terhadap Refugees Palestina di Yordania pada tahun 2018-2022*” yang ditulis oleh Shane Resley Kuhuparuw Dkk. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada teori Liberalisme yang digunakan untuk menganalisis strategi diplomasi kemanusiaan Indonesia, yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dan peran negara dalam menjaga perdamaian dunia. Namun demikian, penelitian ini hanya mengandalkan data sekunder dari literatur seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, serta platform resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Keterbatasan akses terhadap data primer, seperti wawancara langsung dengan diplomat atau pejabat terkait, dapat mempengaruhi kedalaman analisis, sehingga masih terbuka bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis. Jurnal ini tentu bermanfaat bagi peneliti yang memberikan wawasan berharga tentang strategi diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap pengungsi Palestina di Yordania pada periode 2018-2022.
9. Jurnal dengan judul “*Peran Indonesia Pada Konflik Israel – Palestina Melalui Multi-Track Diplomacy*” yang ditulis oleh Relycia Solihin Dkk. Kelebihan Jurnal ini menggunakan konsep *Multi-Track Diplomacy* yang mencakup sembilan jalur diplomasi, termasuk pemerintah, pegiat perdamaian non-pemerintah, pelaku bisnis, aktivis agama, pendanaan, dan media. Pendekatan ini memberikan pandangan holistik tentang peran berbagai elemen masyarakat Indonesia dalam upaya perdamaian. Namun demikian Penelitian ini tampaknya lebih banyak mengandalkan data sekunder, seperti dokumentasi dan literatur yang ada, tanpa melibatkan data primer seperti wawancara dengan pelaku diplomasi atau pengamat terkait, sehingga masih terbuka bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis. Jurnal ini tentu memberikan manfaat bagi peneliti tentang pendekatan komprehensif Indonesia dalam menangani konflik Israel-Palestina melalui *Multi-Track Diplomacy*.

10. Jurnal yang berjudul *“Dampak Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel dan Negara-Negara Arab Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah”* yang ditulis Fadhlhan Nur Hakim Dkk. Kelebihan jurnal ini terletak dalam memberikan analisis mendalam tentang bentuk normalisasi antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel, faktor-faktor yang mendorong normalisasi, serta dampaknya terhadap Palestina. Namun demikian, Fokus utama penelitian ini adalah pada dampak terhadap Palestina, sehingga analisis mengenai implikasi bagi kebijakan luar negeri Indonesia mungkin kurang mendalam, sehingga masih terbuka bagi peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis.

1.7 Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bentuk dan strategi diplomasi Pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina selama periode 2014–2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses, makna, dan dinamika sosial-politik yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau statistik. Fokus utama dari penelitian kualitatif deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis dan faktual realitas empiris sebagaimana adanya, berdasarkan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari sumber-sumber relevan.⁵¹

Penelitian kualitatif menekankan pada makna di balik tindakan sosial dan kebijakan yang diambil oleh aktor negara, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta institusi terkait lainnya. Peneliti berupaya mengungkap pola-pola, narasi, dan konteks di balik kebijakan diplomasi Indonesia terhadap Palestina dengan menganalisis dokumen resmi, pidato kenegaraan, berita, serta literatur ilmiah. Desain deskriptif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 15–16.

untuk menguji hipotesis, tetapi untuk memberikan pemahaman yang utuh dan naratif terhadap fenomena yang diteliti.⁵²

Dalam konteks studi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri, pendekatan kualitatif deskriptif sering digunakan untuk menganalisis dinamika diplomasi yang bersifat kontekstual dan kompleks. Pendekatan ini memberikan keleluasaan dalam menggali konteks historis, ideologis, dan strategis dari kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu, pendekatan ini relevan untuk menelaah peran aktor non-negara seperti masyarakat sipil dan media dalam mendukung arah diplomasi yang bersifat kemanusiaan.⁵³

Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif dianggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana bentuk dan strategi diplomasi Indonesia terhadap Palestina selama satu dekade terakhir. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana nilai-nilai kebangsaan, kepentingan internasional, serta solidaritas global terwujud dalam praktik diplomasi Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis sebagai salah satu kerangka analisis untuk memahami konteks diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pendekatan sosio-historis adalah metode yang mengkaji peristiwa sosial dan politik dengan mempertimbangkan dimensi sejarahnya, sehingga memungkinkan peneliti melihat kontinuitas, perubahan, dan makna sosial dari suatu kebijakan atau tindakan. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelusuri latar belakang historis hubungan Indonesia–Palestina dan bagaimana konstruksi sosial-politik bangsa Indonesia turut memengaruhi arah diplomasi luar negeri.⁵⁴

Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa setiap kebijakan luar negeri tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari konfigurasi sosial, politik, budaya, dan pengalaman sejarah suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam

⁵² Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 11–12.

⁵³ Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2013), hlm. 76–79.

⁵⁴ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 89–91.

menganalisis diplomasi Indonesia terhadap Palestina, penting untuk melihat warisan sejarah anti-kolonialisme, identitas sebagai negara Muslim terbesar di dunia, serta keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional sejak era Soekarno hingga pemerintahan kontemporer.⁵⁵

Melalui pendekatan sosio-historis, peneliti dapat mengkaji bagaimana pengalaman sejarah Indonesia yang pernah mengalami penjajahan turut membentuk sikap moral dan politik terhadap Palestina. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami narasi-narasi yang berkembang di masyarakat, baik melalui pidato-pidato kenegaraan, kebijakan luar negeri, maupun solidaritas publik, sebagai bagian dari konstruksi sosial yang mereproduksi dukungan terhadap Palestina.⁵⁶ Dengan kata lain, pendekatan ini membantu menjembatani antara analisis struktural (politik luar negeri negara) dan analisis kultural (kesadaran kolektif bangsa).

Dengan demikian, pendekatan sosio-historis memberi kedalaman analisis dalam penelitian ini, karena tidak hanya menjelaskan "apa" yang dilakukan Indonesia dalam mendukung Palestina, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" kebijakan tersebut dibentuk oleh realitas sosial dan sejarah Indonesia. Ini menjadikan pendekatan sosio-historis relevan dan signifikan dalam mengkaji hubungan diplomatik yang bersifat ideologis dan simbolik seperti hubungan Indonesia dan Palestina.⁵⁷

Metode historis merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan kritis dengan tujuan memahami makna, hubungan sebab-akibat, dan relevansi peristiwa tersebut terhadap masa kini. Menurut Gilbert J. Garaghan, metode historis adalah "*a critical method of inquiry in which the investigator seeks to discover, from records and other sources, what actually happened in the past.*"⁵⁸ Artinya, metode ini tidak

⁵⁵Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 21–23.

⁵⁶Peter Burke, *What is Cultural History?* (Cambridge: Polity Press, 2004), hlm. 55–58.

⁵⁷Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Berkeley: University of California Press, 1984), hlm. 281–285.

⁵⁸Theodore J. Garaghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1950), hlm. 121–130.

hanya mengumpulkan data historis, tetapi juga menekankan pada verifikasi dan interpretasi terhadap bukti-bukti sejarah secara kritis.

Garaghan menjelaskan bahwa dalam metode historis, proses penelitian harus mencakup empat langkah utama: (1) heuristik atau pencarian sumber, (2) kritik sumber, baik eksternal maupun internal, (3) interpretasi, dan (4) historiografi atau penyusunan narasi sejarah.⁵⁹ Kritik eksternal bertujuan menilai keaslian sumber, sedangkan kritik internal menilai isi dan keandalan informasi yang terkandung dalam sumber tersebut. Melalui proses ini, peneliti diharapkan mampu membedakan antara fakta dan opini, serta menyusun gambaran peristiwa yang obyektif dan masuk akal.

Dalam konteks penelitian mengenai diplomasi Indonesia terhadap Palestina, metode historis menurut Garaghan sangat relevan digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri dokumen-dokumen resmi, pidato politik, arsip diplomatik, serta laporan media dari kurun waktu 2014–2024 sebagai bahan utama analisis. Melalui proses kritik dan interpretasi, peneliti dapat memahami perubahan kebijakan, konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia, dan faktor-faktor historis yang mempengaruhi keputusan diplomatik pemerintah.

Dengan demikian, metode historis memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam penelitian ini, karena tidak hanya berfokus pada narasi peristiwa, tetapi juga memberikan kerangka untuk menilai keabsahan dan makna data sejarah. Prinsip kehati-hatian, verifikasi sumber, dan penyusunan analisis yang logis menjadikan metode ini penting dalam membangun argumen akademik yang valid dan kredibel mengenai posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada asal-usul informasi yang digunakan untuk menganalisis diplomasi Indonesia. Sumber ini dibagi menjadi beberapa kategori:

1) Sumber Primer

⁵⁹Theodore J. Gaghan, *Ibid.*,

Sumber data yang berasal langsung dari periode atau peristiwa yang diteliti. Contoh Sumber Primer yaitu: dokumen resmi pemerintah berupa, pernyataan resmi Presiden RI, Menteri Luar Negeri, atau diplomat Indonesia di forum internasional seperti PBB atau OKI. Naskah pidato atau arsip kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina. Resolusi internasional yaitu resolusi yang diusulkan atau didukung oleh Indonesia di PBB terkait Palestina. Hasil wawancara langsung dengan pejabat Kementerian Luar Negeri, akademisi, atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam isu Palestina dan Laporan tahunan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia atau lembaga lain yang relevan.

2) Sumber Sekunder

Sumber data yang disusun oleh pihak lain berdasarkan sumber primer atau penelitian terkait. Contoh Sumber Sekunder yaitu berupa buku yang membahas sejarah diplomasi Indonesia atau politik luar negeri di Timur Tengah, jurnal ilmiah tentang hubungan internasional atau studi kasus Palestina, liputan media terkait peran Indonesia dalam mendukung, publikasi dari Amnesty International, Human Rights Watch, atau lembaga HAM yang mendokumentasikan peran Indonesia dan video dari YouTube atau media sosial yang berisi rekaman konferensi, pidato, atau wawancara pejabat terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh, mengidentifikasi, dan menginterpretasikan data atau informasi yang relevan guna merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu. Dalam penelitian sejarah, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang memberikan gambaran otentik mengenai suatu periode, peristiwa, atau tokoh tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini bertujuan mengumpulkan data primer dari sumber-sumber yang relevan dan kredibel terkait kebijakan diplomasi Indonesia terhadap Palestina dalam kurun waktu 2014-2024. Sumber data berupa dokumen

resmi seperti; arsip Kementerian Luar Negeri Indonesia, dokumen kebijakan pemerintah, pernyataan resmi di forum internasional (seperti PBB atau OKI). Dokumen laporan internasional seperti: resolusi PBB, laporan lembaga HAM, atau laporan organisasi internasional seperti amnesty International. Literatur akademik seperti: buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas hubungan diplomatik Indonesia-Palestina. Media massa seperti: artikel berita, wawancara, dan editorial dari media nasional maupun internasional yang berkaitan dengan topik penelitian, dan sumber digital seperti: situs web resmi pemerintah Indonesia, video dokumentasi pidato diplomasi, dan rekaman seminar terkait isu Palestina.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data primer berupa pandangan, pengalaman, dan penjelasan langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau memahami diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Berikut ini merupakan daftar narasumber potensial penelitian ini:

1. Pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia, terutama yang terlibat dalam diplomasi Palestina.
2. Diplomat senior yang pernah aktif dalam sidang internasional terkait isu Palestina.
3. Akademisi dan pakar hubungan internasional yang fokus pada studi Timur Tengah atau politik luar negeri Indonesia.
4. Perwakilan organisasi kemanusiaan: Yang berkolaborasi dengan pemerintah terkait isu Palestina.
5. Tokoh masyarakat yang berperan dalam advokasi mendukung Palestina.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini memerlukan pendekatan analisis yang mendalam untuk memahami bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi pada periode tersebut. Dalam konteks penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah dan hubungan internasional. Data yang telah dikumpulkan dari dokumen, wawancara, atau sumber lainnya dianalisis dengan cara mendeskripsikan fakta yang ditemukan dan kemudian menginterpretasikannya. Kemudian, Data disusun menjadi narasi yang

koheren, menggambarkan kronologi dan konteks diplomasi Indonesia selama 2014-2024. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) sebagai pendekatan utama dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi arsip. Analisis isi merupakan metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasi makna dari teks, simbol, narasi, atau pesan dalam suatu dokumen atau komunikasi. Teknik ini sangat relevan dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam memahami pola komunikasi politik, diplomasi, serta representasi ideologi dalam dokumen resmi maupun media.⁶⁰ Analisis isi memungkinkan peneliti untuk menggali tidak hanya apa yang dikatakan (teks eksplisit), tetapi juga makna yang tersembunyi atau tersirat (konteks dan subteks) dalam berbagai bentuk komunikasi. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi diterapkan terhadap pidato-pidato Presiden Republik Indonesia, pernyataan Menteri Luar Negeri di forum internasional, resolusi atau pernyataan sikap Indonesia di PBB dan OKI, serta dokumen media dan arsip terkait Palestina. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengenali konsistensi, perubahan wacana, serta penekanan ideologis yang membentuk arah diplomasi Indonesia terhadap Palestina.⁶¹

Proses analisis dilakukan melalui tahapan-tahapan, *pertama*, reduksi data, yakni memilih bagian-bagian yang relevan dari dokumen atau transkrip untuk dianalisis. *Kedua*, pengelompokan data ke dalam tema-tema tertentu seperti bentuk diplomasi (bilateral, multilateral, publik), strategi retorika (simbolik, normatif, kemanusiaan), dan konteks kebijakan (respon terhadap peristiwa internasional). *Ketiga*, peneliti melakukan interpretasi tematik, yaitu membaca hubungan antar tema dan menyusun narasi argumentatif yang menjelaskan kecenderungan atau arah dari diplomasi Indonesia terhadap Palestina.⁶² Salah satu keunggulan dari analisis

⁶⁰Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage, 2013), hlm. 24–28.

⁶¹Elo, Satu & Kyngäs, Helvi. "The Qualitative Content Analysis Process," *Journal of Advanced Nursing*, Vol. 62, No. 1 (2008): 107–115.

⁶²Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE, 2020), hlm. 114–117.

isi adalah kemampuannya untuk menangkap perubahan wacana dalam rentang waktu yang panjang, seperti yang diteliti dalam periode 2014–2024. Teknik ini juga fleksibel dalam menghadapi beragam jenis data, baik teks tertulis, visual, maupun lisan (hasil wawancara). Oleh karena itu, analisis isi dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Indonesia mengonstruksi posisinya di hadapan isu Palestina melalui bahasa diplomasi dan tindakan politik.⁶³ Dengan menggunakan analisis isi, peneliti tidak hanya mengidentifikasi data secara deskriptif, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana makna dan pesan diplomatik dibangun, disampaikan, dan diterima dalam konteks hubungan internasional. Teknik ini diharapkan mampu menghasilkan interpretasi yang tajam dan relevan, serta mendukung temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina selama satu dekade terakhir.

5. Interpretasi

Upaya diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina selama dekade 2014–2024 dapat ditelusuri secara konkret melalui berbagai dokumen primer yang dihasilkan oleh negara. Sumber-sumber tersebut mencakup pidato Presiden Republik Indonesia, pernyataan resmi Menteri Luar Negeri, laporan tahunan Kementerian Luar Negeri, resolusi forum multilateral, dan nota diplomatik bilateral dengan Palestina. Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan pola konsistensi, resistensi terhadap tekanan geopolitik, serta artikulasi nilai kemanusiaan dalam diplomasi Indonesia. Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2020 secara eksplisit menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa "Indonesia terus mendukung Palestina untuk mendapatkan hak-haknya sesuai prinsip keadilan dan hukum internasional."⁶⁴ Pernyataan tersebut merepresentasikan keberlanjutan komitmen Indonesia di tengah dinamika global yang berubah. Sumber primer dari pidato

⁶³ Mayring, Philipp. "Qualitative Content Analysis," *Forum: Qualitative Social Research*, Vol. 1, No. 2 (2000).

⁶⁴ Pidato Presiden RI di Sidang Umum PBB, 2020, hlm. 4.

Presiden Jokowi juga memperlihatkan bahwa isu Palestina bukan hanya bagian dari agenda luar negeri, tetapi juga merupakan ekspresi konstitusional Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.⁶⁵ Dalam konteks ini, diplomasi Indonesia dibingkai dalam kerangka moral dan historis, bukan sekadar kepentingan strategis sempit.

Interpretasi terhadap laporan tahunan Kementerian Luar Negeri RI tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk memperjuangkan isu Palestina, khususnya dalam menolak aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel.⁶⁶ Laporan tersebut mencatat secara eksplisit langkah Indonesia dalam membangun konsensus dengan negara-negara anggota GNB dan OKI. Pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sidang Dewan HAM PBB tahun 2021 menegaskan bahwa Indonesia "akan terus menjadi suara bagi rakyat Palestina di forum internasional."⁶⁷ Sumber ini mencerminkan peran Indonesia sebagai negara Global South yang berusaha memperjuangkan keadilan internasional melalui saluran multilateral.

Dalam pidato Menteri Luar Negeri di KTT Luar Biasa OKI (2023), Indonesia menolak langkah-langkah sepihak yang mengancam status Yerusalem dan mengingatkan pentingnya implementasi resolusi PBB yang relevan.⁶⁸ Ini mengindikasikan sikap tegas Indonesia dalam mengawal proses dua negara dan menjaga posisi politik luar negerinya tetap stabil. Selain pernyataan formal, sumber primer lain seperti Nota Diplomatik RI–Palestina tahun 2016 mengafirmasi bantuan Indonesia dalam bentuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza.⁶⁹ Bantuan ini tidak hanya mencerminkan komitmen kemanusiaan, tetapi juga menjadi instrumen soft diplomacy yang memperkuat legitimasi diplomatik Indonesia di mata rakyat Palestina.

Sumber visual dari UN Web TV menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten menggunakan slot intervensi di forum PBB untuk mengangkat isu

⁶⁵Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan alinea pertama.

⁶⁶Laporan Tahunan Kemlu RI, 2019, hlm. 25–27.

⁶⁷Pernyataan Menlu RI di Sidang HAM PBB, 2021, hlm. 3.

⁶⁸Dokumen Resmi KTT OKI 2023, hlm. 11.

⁶⁹Nota Diplomatik RI–Palestina, 2016, hlm. 2.

Palestina. Misalnya, dalam Sidang Umum PBB 2022, perwakilan Indonesia menegaskan bahwa "tanpa kemerdekaan Palestina, perdamaian Timur Tengah akan selalu semu."⁷⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia memosisikan Palestina sebagai prasyarat etis bagi stabilitas regional. Resolusi DK PBB No. 2334 tahun 2016, yang mengecam permukiman ilegal Israel, mendapat dukungan aktif dari Indonesia. Dalam laporan internal Kemlu RI, dicatat bahwa Indonesia "secara konsisten mendorong implementasi resolusi tersebut melalui forum diplomatik bilateral dan multilateral."⁷¹ Ini menandakan bahwa Indonesia tidak berhenti pada wacana, tetapi aktif dalam diplomasi normatif.

Sumber primer juga menunjukkan bahwa Indonesia berusaha membangun solidaritas Global South untuk mendukung Palestina. Dalam laporan KTT Gerakan Non-Blok tahun 2019, tercatat bahwa Indonesia mengusulkan agar negara-negara anggota GNB menolak normalisasi hubungan dengan Israel tanpa kemerdekaan Palestina.⁷² Hal ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam membentuk opini kolektif. Dalam wawancara resmi Retno Marsudi yang dikutip oleh Kemlu RI, ia menyatakan bahwa "dukungan terhadap Palestina adalah bagian dari wajah politik luar negeri Indonesia yang beradab."⁷³ Pernyataan ini menegaskan dimensi normatif dari diplomasi Indonesia, sekaligus menjawab kritik atas ketidakefisienan politik luar negeri di kawasan lainnya.

Sumber dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) 2015 yang diselenggarakan di Jakarta menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadikan Palestina sebagai simbol perjuangan dekolonisasi.⁷⁴ Dalam deklarasi resmi KAA, disebutkan bahwa Palestina masih menjadi satu-satunya bangsa Asia-Afrika yang belum merdeka, dan forum mendesak pengakuan kemerdekaannya secara internasional. Interpretasi terhadap naskah pernyataan Indonesia dalam KTT OKI 2017 juga memperlihatkan keberpihakan Indonesia terhadap prinsip status Yerusalem Timur sebagai ibu kota

⁷⁰UN Web TV, Sidang Umum PBB 2022, transkrip pernyataan Indonesia.

⁷¹Laporan Kemlu RI, Divisi Multilateral, 2017, hlm. 19.

⁷²Dokumen KTT GNB, 2019, hlm. 7.

⁷³Wawancara Retno Marsudi, Kemlu RI Media Brief, 2020.

⁷⁴Deklarasi KAA Jakarta, 2015, hlm. 3.

Palestina.⁷⁵ Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendesak semua negara anggota agar tidak mengikuti langkah Amerika Serikat yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

Sumber dari situs resmi Kedutaan Palestina di Jakarta menunjukkan pengakuan tinggi terhadap dukungan Indonesia.⁷⁶ Dalam pernyataan resmi Dubes Palestina, disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara Muslim pertama di Asia yang konsisten dan vokal dalam membela kemerdekaan Palestina sejak awal.” Pernyataan ini memperkuat persepsi bahwa diplomasi Indonesia mendapat legitimasi dari pihak Palestina sendiri. Sumber dari UNRWA tahun 2020 mencatat kontribusi bantuan kemanusiaan Indonesia bagi pengungsi Palestina.⁷⁷ Dokumen ini menjadi bukti bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia memiliki dampak nyata, tidak hanya berupa simbolik, tetapi juga substansi material di lapangan. Dalam pidato Presiden Jokowi di KTT GNB 2020, ia menegaskan bahwa “dukungan terhadap Palestina bukan retorika, tetapi komitmen Indonesia terhadap prinsip keadilan global.”⁷⁸ Pernyataan ini mendukung tesis bahwa diplomasi Indonesia terhadap Palestina berada dalam kerangka ideologis yang stabil.

Sumber primer juga memperlihatkan peran masyarakat sipil Indonesia sebagai bagian dari kekuatan diplomasi publik. Dokumentasi aksi solidaritas nasional yang diakui oleh Kemlu dalam laporan 2018 menyebut bahwa diplomasi publik “telah memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dalam isu Palestina.”⁷⁹ Salah satu sumber penting adalah resolusi internal DPR RI tahun 2021 yang menyatakan dukungan penuh terhadap Palestina dan mendesak pemerintah menolak segala bentuk tekanan normalisasi.⁸⁰ Sumber ini menunjukkan bahwa diplomasi terhadap Palestina merupakan konsensus nasional lintas lembaga. Dokumen hasil pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Palestina (Ramallah, 2016) juga mencatat komitmen

⁷⁵ Pernyataan Indonesia dalam KTT OKI 2017, hlm. 5.

⁷⁶ Situs Kedubes Palestina, Jakarta, arsip 2021.

⁷⁷ UNRWA Indonesia Donor Report, 2020, hlm. 12.

⁷⁸ Pidato Presiden RI dalam KTT GNB Virtual, 2020, hlm. 2.

⁷⁹ Laporan Diplomasi Publik Kemlu RI, 2018, hlm. 8.

⁸⁰ Resolusi DPR RI No. 2 Tahun 2021 tentang Palestina, hlm. 1.

Indonesia dalam mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.⁸¹ Ini merupakan bukti upaya strategis Indonesia dalam diplomasi keanggotaan. Dengan demikian keseluruhan sumber primer menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia terhadap Palestina selama 2014–2024 bersifat multidimensi—mencakup aspek politik formal, kemanusiaan, normatif, hingga keterlibatan publik. Dokumen-dokumen tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya konsisten secara politik, tetapi juga aktif menggalang kekuatan moral internasional untuk membela Palestina.

6. Hitorografi

Historiografi dalam konteks penelitian ini merujuk pada cara penulis membangun narasi sejarah mengenai keterlibatan diplomatik Pemerintah Indonesia dalam isu Palestina selama satu dekade terakhir. Historiografi ini tidak hanya menyusun kronologi peristiwa, melainkan juga menempatkan fakta-fakta diplomatik dalam kerangka ideologis, institusional, dan sosial-politik Indonesia. Dengan pendekatan sosio-historis, tesis ini memadukan data empiris dan refleksi historis dalam enam bab utama yang saling terhubung secara tematis dan kronologis.

Bab I Pendahuluan

Bagian Pendahuluan merupakan fondasi historiografi penelitian dengan menjelaskan latar belakang pentingnya isu Palestina dalam politik luar negeri Indonesia. Bab ini menempatkan dukungan Indonesia terhadap Palestina sebagai kelanjutan dari semangat anti-kolonial yang diwariskan oleh pendiri bangsa. Di dalamnya dijelaskan bahwa periode 2014–2024 mencerminkan fase baru diplomasi Indonesia yang menekankan "diplomasi kemanusiaan", terutama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kerangka teori yang mendasari analisis historis tentang strategi diplomasi bilateral, multilateral, dan publik.

Bab II Konteks Sejarah dan Hubungan Diplomatik Indonesia–Palestina.

⁸¹ Berita Acara Pertemuan RI–Palestina di Ramallah, 2016, hlm. 4.

Pada Bab ini penulis menyajikan rekonstruksi historis dari hubungan kedua bangsa sejak 1945. Bab ini merupakan ruang historiografi murni yang menelusuri akar ideologis dan politik dari posisi Indonesia terhadap Palestina, dimulai dari peran Soekarno dalam Konferensi Asia-Afrika 1955, penolakan terhadap Israel, hingga pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina pada 1988. Bab ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan bersifat reaktif, melainkan konsisten secara struktural dalam politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Narasi historiografis ini penting karena menjadi pijakan nilai bagi kebijakan Indonesia kontemporer.

Bab III Kondisi Global dan Regional 2014–2024.

Dalam bab ini berfungsi sebagai kerangka kronologis dan analitis atas perkembangan lingkungan eksternal yang mempengaruhi arah diplomasi Indonesia. Bab ini mengkaji eskalasi konflik di Palestina (Gaza War 2014, 2018, 2021, 2023), perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (termasuk pengakuan Yerusalem oleh Trump), serta munculnya Abraham Accords. Historiografi bab ini menunjukkan bagaimana dinamika internasional memaksa Indonesia untuk merespons secara adaptif, tanpa mengorbankan prinsip dasar kebijakan luar negeri terhadap Palestina. Selain itu, bab ini juga mencatat munculnya tantangan dari negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel, menguji konsistensi posisi Indonesia.

Bab IV Bentuk Upaya Diplomati Indonesia.

Bab ini Merupakan inti narasi sejarah kebijakan luar negeri Indonesia selama dekade 2014–2024. Bab ini mengkaji secara sistematis tiga jalur diplomasi: (1) diplomasi multilateral melalui PBB, OKI, dan GNB; (2) diplomasi bilateral dengan Palestina dan negara-negara pendukung Palestina; serta (3) diplomasi publik dan kemanusiaan yang melibatkan masyarakat sipil. Historiografi dalam bab ini tidak hanya menggambarkan bentuk tindakan, tetapi juga menyusun kronologi dukungan konkret seperti pembangunan RS Indonesia di Gaza, pidato-pidato di forum internasional, dan bantuan beasiswa serta pelatihan. Di sini terlihat bahwa diplomasi Indonesia adalah kombinasi antara struktur negara dan kekuatan sosial.

Bab V – Analisis Efektivitas dan Tantangan Diplomasi

Pada Bab ini berisi tentang evaluasi kritis terhadap capaian dan hambatan yang dihadapi Indonesia. Historiografi bab ini menggunakan pendekatan evaluatif atas sumber primer seperti resolusi PBB, laporan tahunan Kemlu, dan tanggapan resmi Palestina. Capaian diplomatik seperti penguatan posisi Indonesia di forum multilateral dan pengakuan internasional terhadap komitmennya dijelaskan secara faktual. Namun, bab ini juga merekam tantangan berat seperti tekanan dari negara besar, normalisasi Israel–Arab, dan ketidakseimbangan kekuatan global. Dengan demikian, bab ini menjadi titik temu antara narasi sejarah dan analisis politik kontemporer.

Bab VI Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab ini penulis merangkum hasil historis dan temuan analitis secara reflektif. Secara historiografis, bab ini menegaskan bahwa Indonesia tetap mempertahankan garis diplomasi yang konsisten terhadap Palestina selama 2014–2024, dengan memperluas makna diplomasi menjadi lebih inklusif dan kemanusiaan. Saran dalam bab ini diarahkan pada perlunya memperkuat diplomasi publik, membangun aliansi strategis *Global South*, serta melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain seperti Turki dan Malaysia. Historiografi dalam bagian ini ditutup dengan gagasan bahwa diplomasi Indonesia bukan hanya reaksi atas peristiwa, tetapi juga representasi dari identitas historis dan komitmen moral bangsa Indonesia di kancah dunia.